

# KEPENTINGAN KANADA DALAM PEMBEBASAN AKTIVIS PEREMPUAN SAUDI, SAMAR BADAWI

Oleh: **Khairunnisa Nurhafiza**

**Pembimbing: Umi Oktyari Retnaningsih**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the interests underlying Canada's involvement in urging the release of Saudi Arabian women's rights activist Samar Badawi. Using a qualitative approach and case study method, the research examines the dimensions of Canada's foreign policy grounded in democracy, human rights, and international feminism. Data were collected through literature review of official documents, media reports, and relevant diplomatic statements.*

*The findings reveal that Canada's support for Samar Badawi was not solely driven by a normative commitment to human rights issues, but also constituted part of a soft power strategy to strengthen its global image as a defender of liberal values. Through public statements, diplomatic notes, and engagement in international forums, Canada sought to assert its position as a consistent advocate of human rights.*

*However, such actions triggered diplomatic tensions with Saudi Arabia, reflecting the dilemma between public diplomacy and moral imperatives. The study concludes that the Samar Badawi case illustrates the practice of value-based public diplomacy intertwined with national strategic interests, while also underscoring the complexity of implementing public diplomacy within the dynamics of global politics.*

*Keywords: Women' Rights, Segregation, Activist, Patriarchy, Interests, State, Human Right.*

## PENDAHULUAN

Hubungan internasional merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kebijakan luar negeri atau kepentingan suatu negara terutama dalam bagaimana sebuah kebijakan luar negeri dapat memberi arahan tentang bagaimana sebuah dinamika mengenai aturan dalam ranah internasional. Sehingga sebuah negara dapat melakukan sebuah hal melalui dorongan atas sebuah motif atau kepentingan.<sup>1</sup> Ilmu ini mencakup berbagai interaksi antar masyarakat dan negara, baik melalui pemerintah maupun warga negara.

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan terkait segregasi terhadap perempuan. Laporan *Global Gender GAP* tahun 2021 meletakkan posisi Arab Saudi di nomor 147 negara tidak setara gender dari 156 negara di dunia.<sup>2</sup> Ketimpangan gender di Arab Saudi berkaitan dengan tradisi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam menentukan pilihan hidup perempuan. Pola ini juga tercermin dalam *Personal Status Law* Arab Saudi yang dalam sejumlah pasalnya mengatur secara khusus mengenai peran laki-laki dalam rumah tangga maupun hubungan keluarga.

Sejak 2011 media internasional mulai mencatat Arab Saudi telah melakukan penangkapan secara masif terhadap aktivis perempuan. *Human Right Watch* melaporkan ada 30 aktivis perempuan yang ditahan oleh pemerintah Arab Saudi karena protesnya terhadap aturan larangan mengemudi bagi perempuan.<sup>3</sup> Hukum di Arab Saudi diklaim

disusun berdasarkan Al'Qur-an, Hadist, Ijma dan Qiyas seolah membuat tantangan bagi perempuan di Arab Saudi tidak saja berasal dari negara tapi juga dari agama, bahkan para pengikut nya.

Samar Badawi adalah salah satu aktivis perempuan Saudi yang penangkapannya menarik perhatian dunia internasional. Samar Badawi ditangkap pada tanggal 30 Juli 2018, ini adalah penangkapan kedua dari Samar Badawi, setelah sebelumnya ditangkap pada 12 Januari 2016 dan dibebaskan keesokan hari nya.<sup>4</sup> Penangkapan kedua terjadi setelah Badawi menyuarkan hak-hak perempuan di antaranya adalah terkait hak bersuara dan berpartisipasi dalam politik, mengemudi dan menikah melalui gugatannya ke pengadilan administratif Kementerian Kota Madya Jeddah.<sup>5</sup>

Badawi dihadapkan Pasal 6 Undang-Undang Kejahatan Cyber Arab Saudi dengan tuduhan merusak ketertiban umum, nilai-nilai agama, moral serta kehidupan pribadi, berkomunikasi dengan PBB dan organisasi lain seperti Amnesty International, Human Right Watch dan Al-Qist yang telah dianggap sebagai kelompok yang bertentangan dengan negara.<sup>6</sup> Serta Badawi dikenakan Pasal 39 dimana media massa, sarana penerbitan, sarana ekspresi lainnya harus berfungsi dengan cara yang sopan dan wajar serta mematuhi undang-undang negara karena menyuarkan haknya.

---

<sup>1</sup> McClelland, Charles A. 1986. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Cetakan kedua. Halaman 120.

<sup>2</sup> Omair, Maha, Sultan Alshahrani, dan Abdulaziz Development Index." *Journal of King Saud University - Science* 32, no. 1 (2020): 1233–1245. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2019.10.007>.

<sup>3</sup> Human Rights Watch, "Arab Saudi: Aktivis Hak Perempuan Ditangkap," *Human Rights Watch*, 18

---

Mei 2018, <https://www.hrw.org/id/news/2018/05/18/318091>.

<sup>4</sup> Lawyers Right Watch Canada, "Draft Working Paper on the Arbitrary Detention of Samar Badawi 1" (January 2012), diakses 30 September 2025, 1–11.

<sup>5</sup> Human Rights Watch. *World Report 2015: Saudi Arabia*. 29 Januari 2015. <https://www.refworld.org/reference/annualreport/hrw/2015/en/103687>.

<sup>6</sup> Constitute Project. *Saudi Arabia 1992 (Rev. 2005)*. 2014.

[https://www.constituteproject.org/constitution/Saudi\\_Arabia\\_2005#s2](https://www.constituteproject.org/constitution/Saudi_Arabia_2005#s2).

Penangkapan Samar Badawi menjadi isu internasional terutama setelah Kementerian Luar Negeri Kanada pada tanggal 2 Agustus 2018 memberikan respon terhadap kasus Badawi. Chrystia Freeland Menteri Luar Negeri Kanada sempat menulis di twitter pribadinya (Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi' sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stand together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi). Kanada menyatakan keprihatinannya dan menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian kasus penahanan Samar Badawi melalui jalur diplomatik dan prinsip hak asasi manusia. Pada tanggal 3 Agustus 2018, Departemen Luar Negeri Kanada (Global Affairs Kanada) mengeluarkan tweet yang berbunyi "*Canada is gravely concern about civil society and women' right activist in Saudi Arabia, including Samar Badawi the Saudi Authorities to immediatly released them and all other peacefull human right activist*".<sup>7</sup>

Kanada dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik dalam kebijakan domestik maupun luar negerinya. Sebagai negara demokrasi liberal dengan sistem hukum yang kuat, Kanada telah lama berkomitmen terhadap perlindungan hak sipil, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.<sup>8</sup> Komitmen ini tercermin dalam kontitusi Canadian Charter of Rights and Freedoms tahun 1982 yang menjadi dasar konstitusional bagi hak individu di negara tersebut. Di kancah

internasional, Kanada aktif mendukung resolusi-resolusi hak asasi manusia di PBB, memberikan perlindungan suaka bagi pengungsi politik dan korban penindasan, serta mendanai berbagai inisiatif global yang mempromosikan kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan demokrasi. Reputasi ini menjadikan Kanada sebagai salah satu negara yang paling vokal dalam mengkritik pelanggaran HAM, termasuk terhadap negara-negara seperti Arab Saudi, Myanmar, dan Iran.

Dapat terlihat kasus Hardeep Singh Nijjar, Nijjar menjadi tokoh penting dalam komunitas Sikh di Surrey, British Columbia. Menjabat sebagai presiden Guru Nanak Sikh Gurdwara dan aktif mempromosikan gerakan pro Khalistan melalui organisasi seperti Sikhs for Justice dan Khalistan Tiger Force Nijjar ditembak mati oleh dua pria bertopeng di area parkir gurdwara di Surrey. Pembunuhan ini memicu reaksi kuat dari PM Kanada, Justin Trudeau yang menyatakan terdapat "credible allegations" mengenai keterlibatan agen pemerintah India dalam serangan tersebut langkah yang kemudian mengganggu hubungan diplomatik Kanada dan India, termasuk pengusiran diplomat.<sup>9</sup>

Merespon tweet dari Departemen Luar Negeri Kanada, Saudi justru tidak membebaskan aktivis yang ditahan tersebut, melainkan justru dengan cepat mengumumkan penghentian hubungan bilateral khususnya perdagangan dengan Kanada. Arab Saudi juga meminta Duta Besar Kanada di Arab Saudi kembali ke negara nya dan memanggil pulang Duta Besarnya di Kanada. Selain itu, Arab Saudi juga mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan penerbangan Saudi Arabian Airlines. Dalam kerjasama ekonomi pembelian

---

<sup>7</sup> Ashutosh Pandey. "*Saudi Arabia Expels Canadian Envoy over 'Interference'*". DW. 2018. <https://www.dw.com/en/saudi-arabia-expels-canadian-envoy-for-urging-activists-release/a44962629>.

<sup>8</sup> United Nations General Assembly. *Human Rights Council: Voting Record – Canada*. Diakses 30 Juni 2025. <https://digitallibrary.un.org/>.

---

<sup>9</sup> Sanya Mansoor. (2023). "*What to Know About Canada and India's Dispute Over the Killing of a Sikh Leader*," diakses 30 September 2025 pada <https://time.com/6315565/trudeau-sikh-killingindia-canada/>

gandum dan barley dari Kanada. Arab Saudi memerintahkan para mahasiswa Arab Saudi yang belajar di Kanada untuk pulang.<sup>10</sup>

Atas tingginya perhatian Kanada terhadap kasus Badawi, dan respon Arab Saudi terhadap hal tersebut menjadi alasan penelitian ini menarik untuk dikaji. Penelitian ini diambil melalui usaha Kanada dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan terutama mengenai hak-hak asasi perempuan di Arab Saudi yang ditangkap sehingga memunculkan respons atau bantuan melalui salah satu negara tetangga yakni negara Kanada dalam usaha membebaskan aktivis perempuan Saudi bernama Samar Badawi dengan berbagai inisiatif dan bantuan dari negara internasional yaitu Kanada.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan sifat analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, mengandalkan data dari media sosial seperti Facebook dan Twitter, berita, buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Data dikumpulkan dari bahan tertulis yang ada, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, atau makna terkait topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji berbagai dokumen resmi pemerintah Kanada, laporan organisasi internasional, pemberitaan media internasional, serta literatur akademik yang relevan. Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh data sekunder yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika hubungan Kanada–Arab Saudi serta posisi Kanada dalam membela aktivis perempuan Arab Saudi.

Penelitian ini berfokus pada upaya Kanada dalam mendukung pembebasan salah satu aktivis perempuan Arab Saudi, yaitu Samar Badawi, yang menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Tujuan penelitian adalah untuk memahami sejauh mana sebuah negara dapat berperan dalam isu pelanggaran HAM di negara lain, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, khususnya melalui langkah-langkah yang ditempuh Kanada.

Agar penelitian lebih terarah, penulis memberikan batasan ruang lingkup yang jelas. Penelitian ini hanya membahas kepentingan Kanada dalam upaya pembebasan Samar Badawi pada periode 2018–2021. Aspek pemerintahan domestik Arab Saudi tidak dibahas secara menyeluruh, melainkan hanya dijadikan konteks yang relevan untuk memahami latar belakang diskriminasi gender. Fokus utama tetap diarahkan pada tindakan dan kepentingan Kanada dalam isu ini.

## KAJIAN TEORITIS

### A. Perspektif Konstruktivisme

Pada penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa realitas politik dunia dibentuk secara sosial melalui interaksi antar-aktor, bukan semata-mata ditentukan oleh kekuatan material. Alexander Wendt menyatakan bahwa “*anarchy is what states make of it*,” yang berarti anarki dalam sistem internasional tidak selalu menghasilkan konflik, melainkan dapat bersifat kooperatif tergantung pada identitas, norma, dan interaksi antarnegara.<sup>11</sup> Dengan demikian, kepentingan negara tidak muncul secara alamiah, melainkan dikonstruksi melalui identitas dan norma internasional. Dalam konteks penelitian ini,

---

<sup>10</sup> Middleeasteye. (2018). “Saudi Freezes New Trade with Canada, Expels Envoy for Urging Release of Activists.”. MEE.

---

<sup>11</sup> Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

tindakan Kanada dalam mendesak pembebasan Samar Badawi mencerminkan identitasnya sebagai negara demokratis yang menjunjung nilai liberal dan HAM.

### **B. Kerangka Berpikir**

Menurut Hans Tuch, teori diplomasi publik merupakan salah satu komunikasi politik yang umumnya dilakukan melalui komunikasi langsung dengan publik luar negeri dengan membawa identitas nasional dengan tujuan untuk menciptakan opini publik dan mendukung target politik luar negeri. Seperti yang dikemukakan oleh Tuch, diplomasi publik mengandalkan proses komunikasi yang terbuka yang didasarkan pada prinsip publisitas dengan berupaya berbicara kepada publik tanpa kerahasiaan dan eksklusivitas.<sup>12</sup>

Diplomasi publik juga didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi antara pemerintah suatu negara dengan publik asing dalam upaya nya menciptakan pemahaman ide, cita-cita negara, lembaga dan budaya serta tujuan nasional dan kebijakannya. Diplomasi publik mengacu pada bagaimana diplomat, pemerintah, individu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap publik dengan membangun kepercayaan audiens melalui komunikasi global yang interaktif dengan tujuan untuk memenangkan hati dan pikiran publik asing.

Melalui hal ini, tujuan dari negara Kanada sebagai aktor sejalan dengan teori diplomasi publik karena memilih jalur komunikasi non-tradisional (Twitter), menysasar audiens global, membangun citra sebagai negara pembela HAM, serta menggunakan opini publik internasional sebagai instrumen untuk memperkuat posisinya.

### **C. Tingkat Analisis: Negara**

---

<sup>12</sup> Hans N. Tuch, *Communicating with the World: U.S. Public Diplomacy Overseas* (New York: St. Martin's Press, 1990), 3.

Pada penelitian ini menggunakan tingkat analisis negara. Menurut Mohtar Mas'ood, analisis tingkat negara menekankan bahwa semua pembuat keputusan pada dasarnya didasarkan pada situasi yang sama, di mana negara dipandang sebagai aktor utama dalam hubungan internasional.<sup>13</sup> Sejalan dengan itu, John Rourke menegaskan bahwa negara berperan sebagai unit yang utuh dalam pembuatan keputusan politik luar negeri.<sup>14</sup> Hal ini penting karena kebijakan Kanada dalam kasus Samar Badawi diputuskan secara langsung oleh pemerintah sebagai representasi negara, bukan sekadar tindakan individu.

Kanada diposisikan sebagai aktor utama yang merumuskan kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nasionalnya sekaligus dipengaruhi oleh nilai dan identitas yang dianut. Analisis pada level ini memungkinkan penelitian untuk melihat bagaimana Kanada sebagai unit yang utuh mengambil keputusan diplomatik dalam merespon kasus Samar Badawi. Meski demikian, penelitian ini juga menyentuh aspek tingkat sistem internasional, karena keberadaan norma hak asasi manusia global, tekanan diplomatik, dan dukungan dari komunitas internasional turut memperkuat sikap Kanada. Oleh karena itu, meskipun fokus utamanya berada pada tingkat negara, penelitian ini tetap mempertimbangkan dinamika sistem internasional sebagai faktor yang melingkupi keputusan Kanada.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Kanada dalam mendukung pembebasan aktivis perempuan Arab Saudi, Samar Badawi. Hasil penelitian

---

<sup>13</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, edisi revisi (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1990), 41.

<sup>14</sup> R. John Rourke, *International Politics on the World Stage*. (USA: University of Connecticut, 2001), 81.

diperoleh melalui kajian pustaka terhadap dokumen resmi, laporan organisasi internasional, pemberitaan media, serta pernyataan diplomatik dari pemerintah Kanada dan Arab Saudi. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Kanada dalam kasus ini tidak hanya berakar pada komitmen normatif terhadap hak asasi manusia, tetapi juga terkait erat dengan kepentingan nasional Kanada, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial.

#### **a. Kondisi Gender di Arab Saudi dan Akar Masalah**

Arab Saudi merupakan negara dengan sistem monarki absolut yang sangat menekankan syariah sebagai dasar hukum. Kondisi ini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk peran perempuan dalam masyarakat. Laporan Global Gender Gap tahun 2021 menempatkan Arab Saudi pada peringkat 147 dari 156 negara dalam hal ketidaksetaraan gender.<sup>15</sup> Ketimpangan ini bersumber pada tradisi sosial dan sistem hukum yang menempatkan laki-laki sebagai wali dalam keluarga, sekaligus pengambil keputusan atas hak-hak perempuan.

Beberapa aturan yang diskriminatif masih bertahan, seperti kewajiban perempuan untuk mendapat izin wali dalam pernikahan dan keterbatasan hak asuh anak.<sup>16</sup> Meski Arab Saudi telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 2000, implementasinya tetap dibatasi oleh interpretasi syariat. Dengan demikian, isu ketidaksetaraan gender di Arab Saudi bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga persoalan struktural dalam budaya patriarki.

#### **b. Profil dan Perjuangan Samar Badawi**

<sup>15</sup> Omair, Maha, dkk., "Development Index," *Journal of King Saud University – Science* 32, no. 1 (2020).

<sup>16</sup> UNDP, *Gender Justice & the Law: Kingdom of Saudi Arabia*, 2019.

Dalam konteks tersebut, Samar Badawi muncul sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan perempuan. Ia dikenal berani menentang sistem perwalian laki-laki setelah mengalami kekerasan dari ayahnya.<sup>17</sup> Samar juga aktif dalam kampanye Women2Drive bersama aktivis lain seperti Manal Al-Sharif dan Loujain al-Hathloul, menuntut hak perempuan untuk mengemudi.<sup>18</sup> Penangkapan pertama terhadap Samar terjadi pada tahun 2016, namun ia segera dibebaskan. Penangkapan kedua pada 30 Juli 2018 jauh lebih signifikan, karena Badawi didakwa melanggar Pasal 6 Undang-Undang Kejahatan Siber dengan tuduhan merusak ketertiban umum, berkomunikasi dengan organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta menyuarakan tuntutan kesetaraan gender.<sup>19</sup> Tuduhan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan aktivis perempuan di Arab Saudi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum domestik, tetapi juga sebagai ancaman terhadap legitimasi politik kerajaan. Kasus Samar Badawi segera menarik perhatian dunia internasional, terutama Kanada, yang kemudian memberikan dukungan diplomatik terbuka.

#### **c. Respons Kanada terhadap Penahanan Samar Badawi**

Kanada dikenal sebagai negara yang konsisten dalam menjunjung hak asasi manusia, baik dalam kebijakan domestik maupun luar negeri. Hal ini tercermin dalam Canadian Charter of Rights and Freedoms 1982 yang menegaskan perlindungan terhadap kebebasan sipil, kesetaraan gender, dan hak minoritas.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> The Conversation, "Perempuan Arab Saudi Sedang Berjuang untuk Kebebasan..." 2019.

<sup>18</sup> Yousef, R.K., *Saudi Young Women Activism*, *CyberOrient* 18(2), 2024.

<sup>19</sup> Lawyers Right Watch Canada, "Draft Working Paper on the Arbitrary Detention of Samar Badawi," 2012.

<sup>20</sup> *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, 1982.

Dalam kasus Samar Badawi, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland menyampaikan keprihatinan melalui akun Twitter pribadinya pada 2 Agustus 2018. Ia menulis *“Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi.”*<sup>21</sup> Sehari kemudian, Global Affairs Canada menegaskan sikap resmi pemerintah, *“Canada is gravely concerned about civil society and women’s rights activists in Saudi Arabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful human rights activists.”*<sup>22</sup>

Pernyataan ini bukan hanya bentuk solidaritas, tetapi juga strategi diplomatik untuk menegaskan komitmen Kanada terhadap HAM. Namun, Arab Saudi menanggapi dengan sangat keras: mengusir duta besar Kanada, membekukan investasi baru, menghentikan impor gandum dari Kanada, serta menarik ribuan mahasiswa Saudi yang sedang belajar di Kanada.

#### **d. Kepentingan Kanada dalam Kasus Samar Badawi**

Respons Kanada tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasionalnya, yang dapat dianalisis dalam tiga dimensi:

##### **1. Kepentingan Ekonomi Kanada**

Kanada merupakan negara dengan sistem ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, termasuk dengan kawasan Timur Tengah. Arab Saudi, sebagai salah satu mitra penting, memiliki hubungan dagang dengan Kanada terutama dalam sektor pertanian, energi, serta industri militer. Dalam konteks kasus Samar Badawi,

Kanada menghadapi dilema. Di satu sisi, Kanada memiliki kepentingan menjaga akses pasar ekspor gandum, barley, dan produk pertanian lainnya ke Arab Saudi. Di sisi lain, Kanada juga tengah mengembangkan kontrak penjualan kendaraan lapis baja (Light Armoured Vehicles/LAV 6) buatan General Dynamics Land Systems-Canada kepada Arab Saudi senilai miliaran dolar Kanada. Kontrak tersebut merupakan salah satu kesepakatan ekspor militer terbesar dalam sejarah Kanada, yang menciptakan ribuan lapangan kerja di Ontario.

Namun, ketika Kanada melalui Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland menuntut pembebasan Samar Badawi, Arab Saudi justru merespons dengan menghentikan perdagangan baru, menarik ribuan mahasiswa Saudi yang sedang belajar di Kanada, serta membekukan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi Kanada terkena dampak langsung akibat posisinya yang keras dalam isu HAM. Meskipun begitu, pemerintah Kanada tetap mempertahankan kritiknya terhadap Riyadh, karena melihat bahwa citra internasional Kanada sebagai pembela nilai-nilai liberal dan hak asasi manusia merupakan aset strategis yang tidak bisa dikompromikan begitu saja.<sup>23</sup>

##### **2. Kepentingan Politik Kanada**

Politik luar negeri Kanada sejak lama menekankan komitmen pada demokrasi, multikulturalisme, serta perlindungan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Canadian Charter of Rights and Freedoms (1982) yang menjadi fondasi bagi prinsip-prinsip kebijakan domestik maupun internasional. Dalam kasus Samar Badawi, Kanada menggunakan isu hak asasi perempuan sebagai instrumen diplomasi nilai (value-based diplomacy). Dengan menyuarakan pembebasan aktivis perempuan Saudi, Kanada menegaskan identitasnya sebagai

<sup>21</sup> Chrystia Freeland, Twitter, 2 Agustus 2018.

<sup>22</sup> Global Affairs Canada, Twitter, 3 Agustus 2018.

<sup>23</sup> McClelland, Charles A. (1986). Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem. Cetakan kedua.

negara demokratis liberal yang konsisten memperjuangkan kebebasan sipil dan kesetaraan gender.

Di tingkat politik global, Kanada juga berusaha memperkuat posisinya di Dewan HAM PBB dan forum internasional lain dengan tampil sebagai salah satu negara paling vokal dalam membela hak asasi manusia. Respons Kanada terhadap kasus Samar Badawi bukan hanya bentuk solidaritas moral, tetapi juga strategi politik luar negeri untuk meningkatkan pengaruh global. Akan tetapi, langkah ini menimbulkan ketegangan diplomatik serius dengan Arab Saudi, yang menuduh Kanada melakukan intervensi urusan domestik. Hal ini memperlihatkan dilema klasik antara kepentingan normatif dan kepentingan pragmatis dalam politik luar negeri.<sup>24</sup>

### 3. Kepentingan Sosial Kanada

Selain ekonomi dan politik, Kanada memiliki kepentingan sosial yang erat kaitannya dengan reputasi internasional dan identitas nasional. Kanada secara konsisten mempromosikan feminisme internasional (*feminist foreign policy*) sebagai bagian dari agendanya. Sejak pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau, Kanada memperkuat citra sebagai negara yang pro-kesetaraan gender dan pro-HAM. Kasus Samar Badawi menjadi momentum penting bagi Kanada untuk menunjukkan konsistensi dengan kebijakan feminisme internasional tersebut.

Selain itu, komunitas diaspora di Kanada, termasuk kelompok pro-demokrasi dan pro-HAM, memberi tekanan politik domestik agar pemerintah bersikap tegas terhadap Arab Saudi. Dukungan publik Kanada terhadap isu ini juga relatif tinggi, mengingat Samar Badawi merupakan saudara Raif Badawi, seorang

blogger Saudi yang sebelumnya memperoleh perhatian luas di Barat karena dihukum cambuk akibat kritik terhadap pemerintah Saudi. Dengan demikian, keterlibatan Kanada juga dipengaruhi oleh dinamika opini publik domestik yang menuntut sikap moral yang konsisten.<sup>25</sup>

### e. Respon Arab Saudi dan Dampaknya terhadap Kanada

Respon Arab Saudi terhadap pernyataan Kanada sangat keras. Riyadh mengusir duta besar Kanada, membekukan perdagangan baru, menarik ribuan mahasiswa Saudi dari universitas-universitas Kanada, serta menghentikan penerbangan Saudi Arabian Airlines ke Toronto. Tindakan ini menandai salah satu krisis diplomatik paling serius dalam sejarah hubungan Kanada–Arab Saudi.

Dampaknya terhadap Kanada cukup besar, baik dalam aspek ekonomi maupun reputasi diplomatik. Namun, di sisi lain, krisis ini juga memperkuat citra Kanada sebagai negara yang berani mempertahankan prinsip meskipun menghadapi konsekuensi serius. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan sosial dan politik Kanada dalam membela HAM dianggap lebih penting dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek.<sup>26</sup>

### f. Analisis Konstruktivisme dan Diplomasi Publik

Dalam kerangka teori konstruktivisme, politik internasional tidak hanya dipahami sebagai interaksi berbasis kepentingan material, tetapi juga dibentuk oleh nilai, norma, dan identitas yang dianut

<sup>24</sup> Omair, Maha; Alshahrani, Sultan; & Abdulaziz. (2020). Development Index. *Journal of King Saud University - Science*, 32(1), 1233–1245. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2019.10.007>.

<sup>25</sup> Human Rights Watch. (2018, 18 Mei). Arab Saudi: Aktivistis Hak Perempuan Ditangkap. <https://www.hrw.org/id/news/2018/05/18/318091>.

<sup>26</sup> Lawyers Right Watch Canada. (2012). Draft Working Paper on the Arbitrary Detention of Samar Badawi.

oleh aktor negara. Konstruktivisme menekankan bahwa perilaku negara sering kali ditentukan oleh persepsi dan keyakinan yang berkembang dalam komunitas internasional. Dengan kata lain, apa yang dianggap “penting” atau “benar” dalam hubungan internasional bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan dibangun melalui interaksi sosial dan konstruksi makna bersama.

Dalam kasus Kanada dan Samar Badawi, keterlibatan Kanada dapat dipahami melalui perspektif konstruktivisme karena sikap yang ditunjukkan tidak hanya didorong oleh kepentingan strategis, tetapi juga oleh identitas Kanada sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Identitas ini telah lama menjadi bagian dari politik luar negeri Kanada dan membentuk cara pandang negara tersebut dalam merespons pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, ketika terjadi penangkapan terhadap Samar Badawi, Kanada secara konsisten menunjukkan solidaritasnya melalui saluran diplomasi publik.

Diplomasi publik dalam hal ini berperan sebagai instrumen penting yang memungkinkan Kanada mengekspresikan nilai-nilai normatifnya secara terbuka kepada audiens global. Melalui pernyataan publik Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland di Twitter, diikuti dengan nota diplomatik dan dukungan terhadap laporan lembaga HAM internasional, Kanada membangun narasi bahwa dirinya adalah negara yang tidak tinggal diam terhadap pelanggaran hak-hak perempuan. Strategi komunikasi ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah Arab Saudi, tetapi juga kepada komunitas internasional secara luas, sehingga meneguhkan citra Kanada sebagai

aktor global yang vokal dalam membela HAM.

Dari sudut pandang konstruktivisme, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya Kanada membentuk persepsi internasional mengenai peran dan identitasnya. Negara tidak hanya ingin dipandang sebagai mitra dagang atau aktor militer, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai liberal. Dengan demikian, diplomasi publik yang dilakukan dalam kasus Samar Badawi merupakan refleksi dari konstruksi identitas Kanada sendiri yang menempatkan HAM sebagai nilai utama dalam politik luar negeri.

Namun, praktik diplomasi publik ini juga memunculkan dilema. Respon keras dari Arab Saudi yang mengusir duta besar Kanada menunjukkan bahwa nilai dan norma yang dipromosikan Kanada tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara lain. Di sinilah terlihat keterbatasan konstruktivisme dalam praktik: meskipun nilai dapat membentuk perilaku negara, realitas politik internasional tetap menghadirkan resistensi ketika nilai tersebut dianggap mengganggu kedaulatan atau kepentingan domestik suatu negara.

Dengan demikian, analisis konstruktivisme dan diplomasi publik dalam kasus ini memperlihatkan bahwa tindakan Kanada bukan semata-mata tindakan reaktif, melainkan strategi yang berakar pada identitas, nilai, dan norma yang telah melekat dalam politik luar negerinya. Kasus Samar Badawi menjadi ilustrasi bagaimana diplomasi publik digunakan untuk menyuarakan nilai-nilai liberal sekaligus membangun citra positif Kanada di mata dunia internasional.

Kasus Samar Badawi jelas tidak menyentuh kepentingan vital Kanada, tetapi masuk ke

dalam kepentingan sekunder: menjaga reputasi global, memperluas soft power, serta memperkuat posisi politik luar negeri berbasis nilai.<sup>27</sup>

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Kanada dalam mendesak pembebasan Samar Badawi bukan semata-mata didorong oleh komitmen normatif terhadap hak asasi manusia, melainkan juga terkait erat dengan kepentingan nasional. Kanada berusaha menegaskan identitasnya sebagai negara demokratis liberal yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, kesetaraan gender, serta kebebasan sipil. Melalui diplomasi nilai (value-based diplomacy), Kanada berupaya menjaga konsistensi citra globalnya sebagai pembela hak asasi manusia, meskipun konsekuensinya menimbulkan ketegangan diplomatik serius dengan Arab Saudi.

Selain itu, analisis konstruktivisme memperlihatkan bahwa tindakan Kanada tidak bisa dilepaskan dari identitas dan norma internasional yang telah lama diinternalisasi dalam politik luar negeri mereka. Identitas ini mendorong Kanada untuk bersuara keras terhadap pelanggaran HAM, termasuk pada kasus Samar Badawi. Namun, jika ditinjau dari perspektif kepentingan nasional ala Hans J. Morgenthau, sikap Kanada juga merefleksikan kepentingan sekunder berupa penguatan reputasi internasional, perluasan soft power, serta peningkatan pengaruh politik global. Dengan demikian, tindakan Kanada mencerminkan persilangan antara idealisme moral dan kalkulasi strategis.

Kesimpulannya, kasus Samar Badawi memperlihatkan dilema klasik dalam politik luar negeri, yaitu tarik menarik antara kepentingan

normatif berbasis nilai dan kepentingan pragmatis yang berkaitan dengan ekonomi serta stabilitas hubungan internasional. Meski menghadapi risiko kerugian ekonomi dan krisis diplomatik, Kanada tetap mempertahankan posisinya demi menjaga konsistensi identitas dan legitimasi globalnya. Hal ini menegaskan bahwa diplomasi berbasis nilai, meskipun kompleks dan penuh tantangan, tetap menjadi instrumen penting bagi Kanada dalam membentuk peran serta citra di kancah politik internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashutosh, P. (2018). *Saudi Arabia expels Canadian envoy over 'interference'*. DW. Diakses dari <https://www.dw.com/en/saudi-arabia-expels-canadian-envoy-for-urging-activists-release/a44962629>
- Canadian Charter of Rights and Freedoms. (1982). Government of Canada.
- Constitute Project. (2014). *Saudi Arabia 1992 (Rev. 2005)*. Diakses dari [https://www.constituteproject.org/constitution/Saudi\\_Arabia\\_2005#s2](https://www.constituteproject.org/constitution/Saudi_Arabia_2005#s2)
- Freeland, C. (2018, 2 Agustus). *Twitter post*. Diakses dari <https://twitter.com>
- Global Affairs Canada. (2018, 3 Agustus). *Twitter post*. Diakses dari <https://twitter.com>
- Human Rights Watch. (2015, 29 Januari). *World Report 2015: Saudi Arabia*. Diakses dari <https://www.refworld.org/reference/annualreport/hrw/2015/en/103687>
- Human Rights Watch. (2018, 18 Mei). *Arab Saudi: Aktivis Hak Perempuan Ditangkap*. Diakses dari <https://www.hrw.org/id/news/2018/05/18/318091>

<sup>27</sup> Omair, Maha; Alshahrani, Sultan; & Abdulaziz. (2020). Development Index. *Journal of King Saud University - Science*, 32(1), 1233–1245. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2019.10.007>.

- Lawyers' Rights Watch Canada. (2012). *Draft working paper on the arbitrary detention of Samar Badawi*. Diakses 30 September 2025, hlm. 1–11.
- McClelland, C. A. (1986). *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Cetakan kedua.
- Middle East Eye. (2018). *Saudi freezes new trade with Canada, expels envoy for urging release of activists*. Diakses dari <https://www.middleeasteye.net>
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. New York: Knopf.
- Omair, M., Alshahrani, S., & Abdulaziz. (2020). Development Index. *Journal of King Saud University – Science*, 32(1), 1233–1245. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2019.10.007>
- Rourke, R. J. (2001). *International politics on the world stage*. USA: University of Connecticut.
- Sanya, M. (2023). *What to know about Canada and India's dispute over the killing of a Sikh leader*. Time. Diakses 30 September 2025, dari <https://time.com/6315565/trudeau-sikh-killingindia-canada/>
- The Conversation. (2019). *Perempuan Arab Saudi sedang berjuang untuk kebebasan...*
- United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Gender Justice & the Law: Kingdom of Saudi Arabia*.
- United Nations General Assembly. (2025). *Human Rights Council: Voting record – Canada*. Diakses 30 Juni 2025 dari <https://digitallibrary.un.org>
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yousef, R. K. (2024). *Saudi young women activism*. *CyberOrient*, 18(2).
- Mohtar, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Edisi revisi). Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.